



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PUSAT SERTIFIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL ARIFIN
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 704285

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/156 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 20000000 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 515.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 253.370.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.571.870.000

III. HUTANG Rp. 978.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.593.870.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.